

Term of Reference (ToR)
Diskusi dan Media Briefing

“Merdeka Dari Sakit: Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional”

Jakarta, 7 Agustus 2018

A. Pengantar

Berdasarkan laporan *The Legatum Prosperity Index 2017* (mengukur kesehatan dengan tiga pilar yaitu, kesehatan fisik dan mental mendasar, infrastruktur kesehatan, dan tindakan preventif), Indonesia berada di posisi 101 dari 149 negara, jauh di bawah Vietnam yang berada di posisi 69. Padahal, jika dibandingkan PDB perkapita kedua negara, Indonesia jauh di atas Vietnam. Pada April 2018, PDB perkapita Indonesia US\$ 13.160, sedangkan Vietnam hanya US\$ 7.560 (IMF, 2018).

Universal Healthcare Coverage (UHC) di Indonesia hingga tahun 2017 baru mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah peserta 183 juta jiwa (BPJS Kesehatan, 2018). Target kepesertaan JKN 100% di tahun 2019 sulit dicapai karena masih ada 27,1% jumlah penduduk yang belum menjadi peserta JKN. Bahkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tahun 2019 memprediksikan capaian kepesertaan JKN sebesar 82,4%.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya akselerasi pencapaian UHC. Salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diamanahkan oleh UU No 40/2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU SJSN menekankan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan meningkatkan martabatnya sebagai manusia. Prinsip penyelenggaraan JKN ialah asuransi sosial dan ekuitas (kesejajaran). Namun, capaian belum sesuai target dari sisi kepesertaan dan belum merefleksikan layanan yang berkualitas.

Prakarsa (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana ekuitas kesehatan diterima oleh peserta JKN. Survei dilakukan kepada 1.343 peserta BPJS Kesehatan Kelas III, baik peserta mandiri maupun PBI di 11 Kabupaten/Kota. Beberapa temuan penting dalam survey ini antara lain: (i) pasien merasa bahwa dokter kurang peduli, (ii) *Moral hazard* kerap dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan, baik swasta maupun milik pemerintah, (iii) sistem rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang birokratis, (iv) keterbatasan obat, dan (v) terdapat biaya tambahan yang besar untuk mengakses layanan kesehatan, baik di FKTP maupun di FKTL (*Out of Pocket*).

Permasalahan lainnya adalah keberlanjutan pembiayaan. Selain pelayanan JKN yang belum maksimal, Dana Jaminan Sosial (DJS) pun dilanda defisit. Hingga akhir tahun 2017, defisit DJS mencapai Rp 9 triliun. Besar kemungkinan terjadinya defisit disebabkan oleh biaya klaim yang lebih besar dibanding pendapatan iuran peserta. Jika tidak ada upaya yang luar biasa maka penduduk akan kehilangan hak-hak kesehatan yang semestinya diterima. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan pentingnya implementasi UHC di mana semua orang akan dapat menerima pelayanan kesehatan berkualitas sesuai kebutuhan tanpa menyebabkan kesulitan keuangan akibat kewajiban untuk membayar pelayanan kesehatan tersebut (WHO, 2014). Dalam rangka pencapaian UHC yang berkualitas dan berkelanjutan pada penyelenggaraan JKN maka diperlukan adanya diskursus opsi-opsi kebijakan guna mengakselerasi perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

B. Tujuan

Kegiatan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Dialog tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Membedah capaian, tantangan dan hambatan JKN/BPJS Kesehatan dan;
3. Merumuskan rekomendasi-rekomendasi kebijakan

C. Narasumber

1. Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K) (Menteri Kesehatan RI)
2. Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes (Direktur Utama BPJS Kesehatan)
3. Dede Yusuf M.E., ST, M.Si (Anggota Komisi IX DPR RI)
4. Juniarti (Penderita Kanker Payudara – Penggugat Presiden, BPJS Kesehatan & Menteri Kesehatan)
5. Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa)

Moderator: Cut Nurul Aidha, *Research & Knowledge Manager* Perkumpulan Prakarsa.

D. Peserta

Peserta terdiri dari Organisasi Masyarakat Sipil, pemerintah, praktisi, universitas dan media-massa.

E. Waktu dan Tempat:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Agustus 2018
 Waktu : 13.00 – 16.00 WIB
 Tempat : Century Park Hotel Jakarta Indonesia
 Jl. Pintu Satu Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

F. Jadwal Kegiatan

Waktu	Agenda
12.00 – 13.00	Registrasi & Makan siang
13.00 – 13.10	Pembukaan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa
13.10 – 15.30	<p>Dialog & diskusi:</p> <p>Tema: “Merdeka Dari Sakit: Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional”</p> <p>Pembicara:</p> <p>1. Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K), Menteri Kesehatan RI Sub-topik: UHC dan SDGs di Indonesia: ekuitas, kualitas dan strategi pembiayaan</p>

Waktu	Agenda
	<p>2. Dede Yusuf M.E., ST, M.Si, Anggota Komisi IX DPR RI Sub-topik: Kebijakan Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional: pendataan, pembiayaan, dan pelayanan</p> <p>3. R. Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, Direktur Utama BPJS Kesehatan Sub-topik: Penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <p>4. Juniarti, Penderita Kanker Payudara – Penggugat Presiden, BPJS Kesehatan & Menteri Kesehatan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional: antara aksesibilitas dan kualitas</p> <p>5. Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Catatan kritis dan usulan-usulan perbaikan pelaksanaan JKN di Indonesia</p> <p>Moderator: Cut Nurul Aidha, Research & Knowledge Manager, Perkumpulan Prakarsa.</p>
	Diskusi dan Penutup

G. Kontak

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut tentang acara ini dapat menghubungi Sdr. Irvan Tengku Harja (Hp: 085694272250, email: iharja@theprakarsa.org), Anggara (HP: 0812 8762 2674, email: azunivar@theprakarsa.org).